

ANALISIS SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA PROPINSI SULAWESI UTARA

Merry Christie Natalia Rumagit

Stanny Sicilia Rawung

Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Manado

merryrumagit@unima.ac.id

stannyrawung@unima.ac.id

ABSTRACT

Signs that PAD must become the largest share of financial resources for the implementation of regional autonomy shows that PAD is the most important measure for the ability of regions to organize and realize regional autonomy. In addition, PAD also reflects the independence of a region.

This study found that the contribution of original regional revenue to total regional revenue during the analysis period from the 2009/2010 - 2019 fiscal year was an average of only 3.48%, with an average growth rate of 21.53%. When compared with the contribution of PAD of cities / districts nationally which is 12%, and the contribution of PAD of cities / regencies in North Sulawesi Province which is 6.3%, it can be said that the contribution of PAD to TPD in Minahasa Regency is still below the national average and North Sulawesi Province. By category, Minahasa District has a very low degree of fiscal autonomy, and is still very dependent on financial contributions and assistance from the central government.

Keywords : fiscal autonomy, growth, PAD, government.

PENDAHULUAN

Salah satu ukuran kemampuan daerah untuk melaksanakan otonomi adalah dengan melihat besarnya nilai PAD yang dapat dicapai oleh daerah tersebut. Dengan PAD yang relatif kecil akan sulit bagi daerah tersebut untuk melaksanakan proses penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan secara mandiri, tanpa didukung oleh pihak lain (dalam hal ini Pemerintah Pusat dan Propinsi). Padahal dalam pelaksanaan otonomi ini, daerah dituntut untuk mampu membiayai dirinya sendiri.

Isyarat bahwa PAD harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar bagi pelaksanaan otonomi daerah menunjukkan bahwa PAD merupakan tolok ukur terpenting bagi kemampuan daerah dalam menyelenggarakan dan mewujudkan otonomi daerah. Di samping itu PAD juga mencerminkan kemandirian suatu daerah. Sebagaimana Khusaini, dkk (2013) mengemukakan bahwa PAD merupakan sumber penerimaan yang murni dari daerah, yang merupakan modal utama bagi daerah sebagai biaya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Meskipun PAD tidak seluruhnya dapat membiayai total pengeluaran daerah, namun proporsi PAD terhadap total penerimaan daerah tetap merupakan indikasi derajat kemandirian keuangan suatu pemerintah daerah. Pendapatan Asli Daerah meskipun diharapkan dapat menjadi modal utama bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, pada saat ini kondisinya masih kurang memadai.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka penelitian ini akan mengukur Derajat Otonomi Fiskal (DOF) sebagai ukuran tingkat kemandirian keuangan daerah.

LANDASAN TEORI

Pengertian otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian prinsip dasar otonomi daerah berdasarkan undang-undang tersebut adalah mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih mengutamakan desentralisasi dengan adanya kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan adanya pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta adanya

perimbangan keuangan antara pusat dan daerah.

Selain itu otonomi daerah lebih berorientasi kepada kepentingan masyarakat (lebih bersifat kerakyatan) dari pada kepentingan Pemerintah Daerah. Dalam arti bahwa kewenangan-kewenangan Pemerintah Daerah tersebut sebagai alat dan fasilitator untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, menyebarkan aspirasi dan kepentingan rakyat, memberikan fasilitas kepada rakyat melalui peran serta dan pemberdayaan masyarakat.

Fisipol UGM bekerjasama dengan Badan Litbang Depdagri (1991) menyatakan bahwa untuk menentukan corak otonomi daerah, maka salah satu variabel pokok yang digunakan adalah kemampuan keuangan daerah. Selanjutnya kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari rasio PAD terhadap APBD. Dengan demikian maka besarnya PAD menjadi unsur yang sangat penting dalam mengukur

tingkat kemampuan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah.

Menurut Kuncoro (2007) peran PAD sebagai sumber pembiayaan pembangunan daerah masih rendah. Kendatipun perolehan PAD setiap tahunnya relatif meningkat namun masih kurang mampu menggenjot laju pertumbuhan ekonomi daerah. Untuk beberapa daerah yang relatif minus dengan kecilnya peran PAD dalam APBD, maka upaya satu-satunya adalah menarik investasi swasta domestik ke daerah minus. Pendekatan ini tidaklah mudah dilakukan sebab swasta justru lebih berorientasi kepada daerah yang relatif menguntungkan dari segi ekonomi.

Untuk mengukur Derajat Otonomi Fiskal (DOF) atau tingkat kemampuan daerah dengan menggunakan rasio antara PAD terhadap total penerimaan daerah (Kuncoro, 2006), dengan formula sebagai berikut :

$$TKKD = \frac{PAD}{TPD} \times 100 \%$$

Di mana :

TKKD : Tingkat kemampuan keuangan daerah

PAD : Pendapatan Asli Daerah

TPD : Total penerimaan daerah

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) Data yang digunakan tersebut bersifat runtut waktu (time series) selama 10 tahun dari tahun anggaran 2009/2010 sampai dengan tahun anggaran 2019. Data tersebut bersumber dari Bagian Keuangan, Dinas Pendapatan Daerah Pemeintah Kabupaten Minahasa, dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Minahasa.

PEMBAHASAN

Gambaran tentang pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Minahasa dapat dilihat pada tabel 1. Dalam periode analisis, terlihat bahwa pendapatan asli daerah (PAD) menunjukkan peningkatan yang relatif rendah, bahkan pada tahun anggaran

2011/2012 terjadi pertumbuhan yang negatif sebesar $-3,21\%$ dan tahun 2019 sebesar $-16,42\%$. Sementara laju pertumbuhan yang tertinggi terjadi pada tahun anggaran 2013/2014, yaitu sebesar $136,65\%$. Meskipun pertumbuhan PAD ini mengalami fluktuasi yang cukup tajam, namun secara keseluruhan, rata-rata pertumbuhan PAD selama periode analisis adalah sebesar $21,53\%$ per tahun.

Pergeseran struktur PAD menurut sumber-sumber penerimaannya dapat dilihat pada tabel 2 .

Dengan melihat data pada tabel 2 dapat diketahui bahwa terjadi pergeseran yang cukup berarti dari kontribusi masing-masing sumber penerimaan terhadap nilai PAD. Sumber penerimaan PAD dari pajak daerah menunjukkan peningkatan dari $35,35\%$ (tahun 2009/2010) menjadi $44,78\%$ (tahun 2019) berarti terjadi pertumbuhan sebesar $9,43\%$. Sementara itu kontribusi sumber penerimaan PAD dari retribusi daerah mengalami

penurunan sebesar 12,71% yaitu dari 57,83% pada tahun 2009/2010 menjadi 45,12% pada tahun 2019, meskipun secara relatif terdapat penurunan tetapi secara absolut retribusi daerah mengalami kenaikan yang sangat tinggi. Selanjutnya kontribusi bagian laba BUMD mengalami kenaikan sebesar 0,89% yaitu dari 1,99% pada tahun 2009/2010 menjadi 2,88% pada tahun 2019. Untuk sumber penerimaan PAD dari penerimaan dinas-dinas tidak mengalami perubahan karena dihapuskannya sumber penerimaan tersebut. Selanjutnya sumber penerimaan lain-lain juga mengalami peningkatan sebesar 2,39% yaitu dari 4,83% (2009/2010) menjadi 7,22% (2019). Dengan demikian pada tahun 2019 PAD Kabupaten Minahasa ini sangat tergantung pada penerimaan melalui pajak daerah dan retribusi daerah yang proporsinya mencapai 89,9% dari PAD. Total penerimaan daerah dilihat dari realisasi penerimaan daerah yang merupakan sisi penerimaan dalam anggaran pendapatan dan belanja

daerah (APBD) yang ditetapkan setiap tahun. Selama periode analisis yaitu tahun 2009/2010-2019 menunjukkan peningkatan yang sangat berarti, meskipun laju pertumbuhan tahunannya menunjukkan fluktuasi yang cukup tajam. Peningkatan penerimaan daerah tertinggi terjadi pada tahun 2017/2018 sebesar 37,35% dan terendah terjadi pada tahun 2014/2015 sebesar 6,42%. Gambaran selengkapnya tentang realisasi penerimaan daerah Kabupaten Minahasa selama periode analisis tahun 2009/2010 - 2019 dapat dilihat pada tabel 3.

Selanjutnya dilihat dari sumber penerimaannya sebagaimana tergambar pada tabel 4, penerimaan daerah melalui PAD menunjukkan kenaikan rata-rata pertahun yang paling tinggi yaitu sebesar 21,53%, berikutnya adalah bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak (BHPBP) menunjukkan kenaikan rata-rata pertahun sebesar 15,74%, kemudian diikuti sumbangan dan bantuan sebesar 15,44%.

Terjadinya kenaikan yang sangat menyolok pada penerimaan dari sisa lebih perhitungan tahun lalu yaitu tahun 2019 sebesar Rp5,622 milyar adalah karena adanya penerimaan dari bagi hasil bukan pajak yang baru diterima tepat pada saat tutup tahun anggaran yaitu 31 Maret 2018 Yaitu dari iuran kuasa pertambangan sebesar Rp4.772.905.500,00, sehingga penerimaan tersebut dimasukkan dalam sisa lebih perhitungan tahun lalu. Jika dilihat secara keseluruhan, realisasi total penerimaan daerah rata-rata meningkat sebesar 15,69% pertahun.

Besarnya kontribusi relatif masing-masing sumber penerimaan terhadap realisasi penerimaan daerah serta pergeserannya selama periode analisis dapat dilihat dalam tabel 5.

Pada tahun 2009/2010 realisasi penerimaan daerah terbesar berasal dari sumbangan dan bantuan Pemerintah Pusat yaitu sebesar 75,46% dari total penerimaan daerah; kemudian diikuti oleh bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak (BHP/BHBP) sebesar

20,60%; sementara kontribusi PAD hanya sebesar 2,62%. Struktur penerimaan ini pada tahun 2019 mengalami perubahan di mana kontribusi dari sumbangan dan bantuan Pemerintah Pusat mengalami penurunan menjadi 73,35%, namun demikian secara absolut penerimaan dari sumbangan dan bantuan Pemerintah Pusat mengalami peningkatan yang besar yaitu dari Rp18,650 milyar (2009/2010) menjadi Rp74,873 milyar (2019) sehingga bila dibandingkan dengan sumber penerimaan lainnya, maka penerimaan dari sumbangan dan bantuan Pemerintah Pusat ini masih sangat dominan. Realisasi penerimaan daerah melalui BHP/BHBP juga mengalami penurunan sehingga kontribusinya pada tahun 2019 menjadi 15,60% dari 20,60% pada tahun 2009/2010, namun secara absolut penerimaan dari bagi hasil pajak dan bukan pajak (BHPBP) mengalami kenaikan yang sangat besar yaitu dari Rp5,091 milyar pada tahun 2009/2010 menjadi Rp15.920 milyar

pada tahun 2019.

Sementara kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah mengalami kenaikan dari 2,62% (2009/2010) menjadi 2,91% (2019), meskipun secara relatif kenaikan kontribusi PAD terhadap TPD hanya sebesar 0,29%, tetapi secara absolut penerimaan daerah dari PAD ini mengalami kenaikan yang sangat tinggi yaitu dari Rp646,629 Juta menjadi Rp2,968 milyar. Sumber penerimaan lain adalah dari pinjaman terjadi kenaikan sebesar 2,64%. Sementara dari sisa lebih perhitungan tahun yang lalu terjadi kenaikan sebesar 4,19%.

Dengan melihat terjadinya perubahan PAD dan TPD seperti telah diuraikan sebelumnya, berikut ini dapat disajikan derajat otonomi fiskal atau tingkat desentralisasi fiskal daerah Kabupaten Minahasa. Derajat otonomi fiskal mempunyai makna tentang seberapa besar kewenangan daerah untuk menggali dan menggunakan sumber-sumber ekonomi di daerah untuk membiayai kegiatan pembangunan melalui sumber-sumber keuangan asli

daerahnya dan juga menerangkan bagaimana tingkat ketergantungan fiskal daerah. Ukuran yang digunakan untuk menentukan tolok ukur derajat otonomi fiskal adalah dengan menghitung rasio atau nisbah antara PAD terhadap TPD dan nisbah antara PAD terhadap sumbangan dan bantuan pemerintah pusat. Derajat otonomi fiskal atau tingkat desentralisasi keuangan daerah akan berkisar antara 0,00-100,00 (Tim Peneliti Fisipol UGM dan Litbang Depdagri, 1991). Semakin mendekati 100,00 menerangkan bahwa kemampuan keuangan daerah semakin baik. Secara rinci disusun kategori sebagai berikut:

Kisaran DOF RatioPAD terhadap TPD	Keterangan
1. 00,00 – 10,00	(sangat kurang)
2. 10,10 – 20,00	(kurang)
3. 20,10 – 30,00	(sedang)
4. 30,10 – 40,00	(cukup)
5. 40,10 – 50,00	(baik)
6. diatas 50,00	(sangat baik)

Pada tabel 6 tampak bahwa pada tahun 2009/2010 derajat otonomi fiskal atau tingkat desentralisasi fiskal kabupaten ini hanya mencapai 2,62%. Berdasarkan

kategori, maka derajat otonomi fiskal kabupaten ini sangat kurang, keadaan ini menunjukkan bahwa peranan PAD kabupaten ini masih sangat rendah.

Pada tahun 2009/2010, derajat otonomi fiskal menunjukkan peningkatan yaitu menjadi 3,48%. Berdasarkan kategori yang digunakan, derajat otonomi fiskal 3,48% masih dikatakan sangat kurang. Dengan kata lain selama sepuluh tahun terakhir PAD Kabupaten Minahasa tidak menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan dibandingkan peningkatan realisasi penerimaan daerah. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih rinci, berikut ini disajikan nisbah antara PAD terhadap sumbangan dan bantuan Pemerintah Pusat sehingga diketahui bagaimana sesungguhnya tingkat ketergantungan fiskal Kabupaten Minahasa.

Pada tabel 7 dapat dilihat bahwa terdapat ketimpangan yang relatif besar antara sumber penerimaan daerah dari PAD dan sumbangan dan bantuan Pemerintah Pusat dalam total penerimaan daerah. Pada tahun

2009/2010, nisbah PAD terhadap sumbangan dan bantuan hanya sebesar 3,47% kemudian pada tahun 2019 meningkat menjadi 4,69%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan fiskal Kabupaten Minahasa terhadap sumbangan dan bantuan Pemerintah Pusat sangat besar. Bila dilihat secara nasional (lampiran 2), kontribusi PAD terhadap TPD kota/kabupaten pada tahun 1998/1999 adalah sebesar 11%, sedangkan untuk Propinsi Sulawesi Utara rata-rata kontribusi PAD terhadap TPD adalah sebesar 6,2%. Dengan demikian kontribusi PAD Kabupaten Minahasa terhadap total penerimaan daerahnya masih di bawah rata-rata Nasional maupun rata-rata Propinsi Sulawesi Utara, yang juga masih dalam kategori sangat kurang.

KESIMPULAN / SARAN

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut.:

1. Kontribusi pendapatan asli

daerah terhadap total penerimaan daerah selama periode analisis dari tahun anggaran 2009/2010 - 2019 rata-rata hanya sebesar 3,48%, dengan tingkat pertumbuhan rata-rata sebesar 21,53%. Jika dibandingkan dengan kontribusi PAD kota/kabupaten secara nasional yang besarnya 12%, dan kontribusi PAD kota/kabupaten dalam Propinsi Sulawesi Utara yang besarnya 6,3%, maka dapat dikatakan bahwa kontribusi PAD terhadap TPD Kabupaten Minahasa masih di bawah rata-rata nasional dan Propinsi Sulawesi Utara. Berdasarkan kategori, maka Kabupaten Minahasa memiliki derajat otonomi fiskal yang sangat kurang, dan secara finansial masih sangat tergantung pada sumbangan dan bantuan dari pemerintah pusat.

2. Meskipun derajat otonomi fiskal daerah sangat rendah tetapi

APBD Kabupaten Minahasa terus mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 15,69% per tahun selama periode analisis tahun 2009/2010 - 2019.

3. Bila melihat tingkat pertumbuhan PAD, maka Kabupaten Minahasa nampak masih memiliki potensi yang belum sepenuhnya digali. Oleh karenanya Pemerintah Daerah diharapkan dapat menghitung kembali potensi dari sumber-sumber pendapatan asli daerah, sehingga dapat diketahui apakah sumber-sumber pendapatan asli daerah tersebut sudah dikelola secara optimal, atau masih perlu dikembangkan kembali.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Litbang Depdagri RI dan FISIPOL-UGM, 1991, Pengukuran Kemampuan Keuangan Daerah Tingkat II Dalam Rangka Otonomi Daerah Yang Nyata Dan Bertanggung Jawab, Jakarta.
- Biro Keuangan Sekretariat Daerah

- Kabupaten Minahasa, 2020, Laporan Keuangan Daerah.
- BPS Minahasa, 2019. Minahasa Dalam Angka.
- Khusaini, Mohammad. 2006. Ekonomi Publik Desentralisasi Fiscal dan Pembangunan Daerah. Madang : BFE UNIBRAW
- Kuncoro, Haryo. 2007. Fenomena Flypaper Effect pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten di Indonesia. Simposium Nasional Akuntansi X.
- Kuncoro, Mudrajad. 2006. Ekonomika Pembangunan: Teori, Masalah dan Kebijakan. Yogyakarta. UUP STIM YKPN
- Moh Khusaini, Jumadi & friends. 2013. "The Impact of Fiscal Decentralization on Local Economic Development in East Java". Journal Of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS, 13 (1) : 1-7. e-ISSN: 2279-0837, pISSN: 2279-0845.
- Smoke, Paul. 2001. "Fiscal Decentralization in Developing Countries A Review of Current Concepts and Practice".
- Democracy, Governance and Human Rights Programme Paper Number 2.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- UU Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah.
- UU No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 18/PMK.07/2017 Tentang Konversi Penyaluran Dana Bagi Hasil Dan/ Atau Dana Alokasi Umum Dalam Bentuk Nontunai.
- Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Tahun 2015-2019.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan.

Lampiran

Tabel 1
Struktur dan perkembangan PAD Tahun 2009/2010-2019
Di Kabupaten Minahasa
(Dalam Ribuan Rupiah)

Tahun	Pjk. Drh	Retr.Drh	Lb. BUMD	Pen. Dinas	Pen. Lain	PAD	^ PAD (%)
2009/2010	228.552	373.921	12.902	0	31.253	646.628	0,00
2010/2011	203.042	431.378	29.118	0	52.530	716.068	10,74
2011/2012	207.507	428.600	15.008	0	41.985	693.100	-3,21
2012/2013	269.536	599.002	29.839	23.055	79.345	1.000.777	44,39
2013/2014	428.919	983.943	89.652	34.433	831.360	2.368.307	136,65
2014/2015	579.926	1.240.935	79.543	206.237	636.001	2.742.642	15,81
2015/2016	549.554	1.831.808	160.766	0	466.721	3.008.849	9,71
2016/2017	786.155	2.153.284	8.596	0	153.705	3.101.740	3,09
2017/2018	1.701.718	1.347.575	26.416	0	476.144	3.551.853	14,51
2019	1.329.461	1.339.380	85.447	0	214.370	2.968.658	-16,42
Rata-rata	628.437	1.072.983	53.729	26.373	298.341	2.079.862	21,53

Sumber: Bagian Keuangan Setda Kabupaten Minahasa, Perhitungan APBD, 2009-2019.

Keterangan: ^ PAD = Pertumbuhan PAD.

Tabel 2
Pergeseran Struktur PAD Menurut Sumber-sumber Penerimaan
Tahun 2009/2010-2019
Di Kabupaten Minahasa

Sumber PAD	Absolut (000)		Relatif (%)		Pertumbuhan	
	2009/2010	2019	2009/2010	2019	(Rp.000)	(%)
a. Pajak Daerah	228.552	1.329.461	35,35	44,78	1.100.909	9,43
b. Retribusi Daerah	373.921	1.339.380	57,83	45,12	965.459	-12,71
c. Bagian Laba BUMD	12.902	85.447	1,99	2,88	72.545	0,89
d. Penerimaan Dinas-Dinas	0	0	0,00	0,00	0	0,00
e. Penerimaan Lain-Lain	31.253	214.370	4,83	7,22	183.117	2,39
Jumlah	646.629	2.968.658	100,00	100,00	2.322.030	

Sumber: lihat tabel .1 (data diolah)

Tabel 3
Total Penerimaan Daerah Tahun 2009/2010-2019
Di Kabupaten Minahasa

TAHUN	SLPTL	PAD	BHPBP	S&B	Pinjaman	TPD	^TPD
	(Ribu)	(Ribu)	(Ribu)	(Ribu)	(Ribu)	(Ribu)	(%)
2009/2010	325.723	646.629	5.091,355	18.650.181	0	24.713.890	0,00
2010/2011	1.286.881	716.070	3.758,210	23.323.911	0	29.085.073	17,69
2011/2012	127.569	693.102	4.853,879	30.068.927	0	35.743.478	22,89
2012/2013	566.257	1.000.779	5.810,698	37.588.302	0	44.966.039	25,80
2013/2014	1.296.487	2.368.310	7.178,361	40.636.876	0	51.480.035	14,49
2014/2015	460.074	2.742.642	8.354,114	43.227.312	0	54.784.142	6,42
2015/2016	892.370	3.008.849	10.626,659	48.304.015	0	62.831.893	14,69
2016/2017	989.250	3.101.740	11.222,636	52.065.577	1.473.298	68.852.501	9,58
2017/2018	195.721	3.551.853	20.824,163	69.995.068	0	94.566.805	37,35
2019	5.622.577	2.968.658	15.920,499	74.873.051	2.697.470	102.082.255	7,95
Rata-Rata	1.176.291	2.079.863	9.364,057	43.873.322	417.077	56.910.611	15,69

Sumber: lihat tabel 1

Keterangan:

1. SLPTL = Sisa Lebih Perhitungan Tahun Lalu
2. PAD = Pendapatan Asli Daerah
3. BHPBP = Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak
4. S&B = Sumbangan dan Bantuan Pemerintah Pusat
5. TPD = Total Penerimaan Daerah
6. ^TPD = Pertumbuhan TPD

Tabel 4
Pertumbuhan Masing-masing sumber Penerimaan Daerah Kabupaten Minahasa Tahun
2009/2010 - 2019

TAHUN	^SLPTL	^PAD	^BHPBP	^S&B	^Pinjaman	^TPD
	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
2009/2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010/2011	295,08	10,74	-26,18	25,06	0,00	17,69
2011/2012	-90,09	-3,21	29,15	28,92	0,00	22,89
2012/2013	343,88	44,39	19,71	25,01	0,00	25,80
2013/2014	128,96	136,65	23,54	8,11	0,00	14,49
2014/2015	-64,51	15,81	16,38	6,37	0,00	6,42
2015/2016	93,96	9,71	27,20	11,74	0,00	14,69
2016/2017	10,86	3,09	5,61	7,79	0,00	9,58
2017/2018	-80,22	14,51	85,56	34,44	0,00	37,35
2019	2.772,75	-16,42	-23,55	6,97	83,09	7,95
Rata-Rata	341,07	21,53	15,74	15,44	8,31	15,69

Sumber: lihat tabel 1 (data diolah).

Tabel 5
Perkembangan Struktur Penerimaan Daerah Tahun 2009/2010 - 2019
Di Kabupaten Minahasa

Sumber	Absolut (000)		Relatif (%)		Pertumbuhan	
	2009/2010	2019	2009/2010	2019	(Rp000)	(%)
Penerimaan						
Sisa Perhitungan	325.723	5.622.577	1,32	5,51	5,162,584	4,19
PAD	646.629	2.968.658	2,62	2,91	226,016	0,29
BHP/BHBP	5.091.355	15.920.499	20,60	15,60	7,566,385	-5,00
Sumbangan/Bantuan	18.650.181	74.873.051	75,46	73,34	31,645,739	-2,12
Pinjaman	0	2.697.470	0,00	2,64	2,697,470	2,64
Jumlah	24.713.890	102.082.255	100,00	100,00	47,298,113	

Sumber: lihat tabel 1 (data diolah).

Tabel 6
Nisbah PAD terhadap TPD Tahun 2009/2010 - 2019
Di Kabupaten Minahasa

Tahun	TPD (000)	PAD (000)	DOF (%)
2009/2010	24.713.890	646.629	2,62
2010/2011	29.085.073	716.070	2,46
2011/2012	35.743.478	693.102	1,94
2012/2013	44.966.039	1.000.779	2,23
2013/2014	51.480.035	2.368.310	4,60
2014/2015	54.784.142	2.742.642	5,01
2015/2016	62.831.893	3.008.849	4,79
2016/2017	68.852.501	3.101.740	4,50
2017/2018	94.566.805	3.551.853	3,76
2019	102.082.255	2.968.658	2,91
Rata-rata	56.910.611	2.079.863	3,48

Sumber: lihat tabel 1 (data diolah).

Tabel 7
Nisbah PAD terhadap Sumbangan dan Bantuan Pemerintah Pusat
Tahun 2009/2010 - 2019
Di Kabupaten Minahasa

Tahun	S&B (000)	PAD (000)	DOF (%)
2009/2010	18.650.181	646.629	3,47
2010/2011	23.323.911	716.070	3,07
2011/2012	30.068.927	693.102	2,31
2012/2013	37.588.302	1.000.779	2,66
2013/2014	40.636.876	2.368.310	5,83
2014/2015	43.227.312	2.742.642	6,34
2015/2016	48.304.015	3.008.849	6,23
2016/2017	52.065.577	3.101.740	5,96
2017/2018	69.995.068	3.551.853	5,07
2019	74.873.051	2.968.658	3,96
Rata-rata	44.571.658	2.199.761	4,69

Sumber: lihat tabel 1 (data diolah).